

CAPAIAN PEMBELAJARAN TINGKAT SARJANA

Tolok Ukurnya Tidak Hanya Berdasar Skripsi

MERDEKA BELAJAR Episode Ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi perguruan tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, telah menerbitkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendikbudristek tersebut diresmikan dalam balutan peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

"Merdeka Belajar Episode Ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi. Sekarang, status akreditasi disederhanakan; pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM, dan proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan bersama pada tingkat pengelola program studi," terang Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, baru-batu ini.

Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Imam Buchori, menyambut baik diterbitkannya Permendikbudristek terkait sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. "Hal ini saya kira sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya untuk program studi yang dalam hal ini baru atau yang mungkin sedang berkembang. Sehingga beban-beban di dalam pelaksanaan akreditasi selama ini dapat dikurangi," ujar Imam Buchori.

Di samping itu, kata Imam, peraturan ini memberikan masa tenggang waktu selama dua tahun. Artinya, transisi selama dua tahun ini harus dipergunakan untuk mempersiapkan banyak hal, misalnya menyiapkan instrumen yang baru, menyiapkan asesor, juga peraturan-peraturan pendukung yang lain. "Untuk itu, kami dari BAN-PT dan tentu dengan teman-teman Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) akan bekerja keras supaya dalam tenggang waktu

selama dua tahun ini dapat terpenuhi," ungkapnya.

Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPTK) Indonesia, Usman Chatib Warsa, mengatakan, melalui transformasi akreditasi pendidikan tinggi, perguruan tinggi dapat lebih fleksibel dalam menentukan standar pendidikan tinggi masing-masing bahkan hingga melampaui standar nasional. Dengan demikian, perguruan tinggi lebih terpacu untuk mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan inovatif serta kerja sama yang lebih luas dengan DUDI dalam mewujudkan proses pembelajaran dan mutu pendidikan yang lebih baik.

Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfa Yondri turut menyambut baik kebijakan baru yang mencakup standar akreditasi ini. Dengan sumber daya yang ada, sumber dana yang ada, yang selama ini dibebankan kepada perguruan tinggi ini nanti akan bisa diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Sehingga akan memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan melakukan kreativitas dan inovasi sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.

Harapannya ke depan, kebijakan ini akan melakukan percepatan dalam hal tata kelola dan juga dalam mempercepat proses dalam peningkatan mutu. Ke depan, perguruan tinggi akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih merdeka dalam menentukan kebijakan secara internal sesuai dengan potensi yang ada.

Sementara itu, Pipit Anggraeni, Dosen Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung, turut mengapresiasi adanya kebijakan pembiayaan akreditasi yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi. Ia berharap, melalui kebijakan tersebut perguruan tinggi dapat meningkatkan dan fokus pada penyediaan layanan pendidikan sesuai standar serta optimalisasi dalam memberikan jaminan kepada masyarakat. "Transformasi akreditasi pendidikan tinggi ini sangat diperlukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pe-



Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.

ingkatan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi," ujar Pipit.

Dijelaskan Mendikbudristek dalam paparannya bahwa langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi adalah (1) Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi; (2) Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun; (3) Peringkat akreditasi yang ada tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai; dan (4) Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan.

Sementara itu, langkah selanjutnya untuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM) adalah (1) Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib; dan (2) Menyesuaikan instrumen akreditasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat dua tahun.

Ukurannya Tidak Hanya Skripsi Permendikbudristek No 53/2023 ini lebih ingin membuktikan sarjana itu ingin mengukur sejauh mana kompetensi seorang mahasiswa. Skripsi hanya menjadi opsi, katanya, karena tidak semua capaian pembelajaran level sarjana itu bisa diukur dengan skripsi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melakukan trans-

formasi di pendidikan tinggi salah satunya mengenai tugas akhir. Kini skripsi sebagai tugas akhir itu bisa dilakukan namun dengan bentuk lain yang disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa.

Plt Dirjen Diktiristik Prof Nizam menjelaskan, yang perlu digarisbawahi dari Permendikbud No 53 ini adalah bukan berarti skripsi itu tidak ada melainkan Kemendikbudristek hanya mengubah bentuk lain dari tugas akhir mahasiswa. "Tugas akhir itu wajib tapi bentuknya tidak harus skripsi. Ini jangan disalahartikan bahwa tidak ada skripsi. Yang diubah itu adalah bentuknya bisa beragam dan diserahkan kepada perguruan tinggi dan prodinya," kata Nizam.

Misalnya untuk jurusan Seni Tari. Mahasiswa yang ingin tugas akhir bisa memilih membuat skripsi atau membuat karya tari. Yang penting adalah, ujarnya, tugas akhir bisa dipilih mana yang paling sesuai untuk mengukur seorang calon sarjana telah kompeten. Permendikbudristek No 53/2023 ini lebih ingin membuktikan sarjana itu ingin mengukur sejauh mana kompetensi seorang mahasiswa. Skripsi hanya menjadi opsi. Tidak semua capaian pembelajaran level sarjana itu bisa diukur dengan skripsi.

"Misalnya mahasiswa ekonomi mungkin dia bisa menyelesaikan kasus finansial di bank. Itu kan lebih menarik dan lebih menunjukkan kompetensi sesungguhnya dibandingkan dengan skripsi," imbuhnya. Contoh lain, Nizam

melanjutkan, mahasiswa vokasi bahkan tidak memerlukan tugas akhir. Hal ini bisa terjadi saat mahasiswa vokasi sudah memegang bukti sertifikat sebagai bukti dia sudah menguasai suatu tugas.

"Misal di tahun pertama dia sudah menguasai bagian mesin, kompeten, dikasih sertifikat. Lalu tahun kedua mampu membongkar mesin, kompeten, dan dikasih sertifikat, begitu seterusnya, tidak perlu ada skripsi. Sertifikat itu bukti sebagai tugas akhir," jelasnya. Kebijakan ini kemudian diturunkan dengan Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. Salah satunya Pasal 18 yang memuat pemberian tugas akhir tak hanya berbentuk skripsi, namun juga bisa prototipe, proyek, dan tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.

Otonomi PT Tingkatkan Mutu

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membuat aturan baru terkait syarat lulus kuliah pada jenjang S1 dan D4. Nadiem menyatakan syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4 tidak wajib membuat skripsi, ada banyak pilihan tugas akhir yang dapat diambil mahasiswa. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah menggaungkan sebuah langkah revolusioner dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi ini mengundang perhatian para pemangku kepentingan untuk merdeka dalam belajar dan meningkatkan standar perguruan tinggi Indonesia.

Dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) terbaru dengan tema "Transformasi Stan-

dar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi", Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yulianti, mengungkapkan urgensi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa saat ini, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia telah mencapai standar baik bahkan sangat baik.

Oleh karena itu, saatnya memberi perguruan tinggi otonomi untuk meningkatkan mutu mereka sehingga dapat bersaing di tingkat internasional. "Saat ini, perguruan tinggi di Indonesia sudah didominasi oleh yang berstandar baik dan bahkan sangat baik, sehingga sudah saatnya perguruan tinggi diberi otonomi sehingga bisa meningkatkan kualitasnya agar sejajar dengan perkembangan perguruan tinggi di dunia," ujar Kiki.

Kemendikbudristek telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan tinggi di Indonesia dan menyimpulkan bahwa banyak yang telah dicapai, tetapi masih ada yang belum tercapai. Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan adalah memberikan perguruan tinggi kepercayaan untuk berinovasi dengan standar nasional yang lebih fleksibel dan tidak bersifat preskriptif.

Menyambut baik Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Mereka mengapresiasi pengurangan beban biaya akreditasi yang selama ini membebani perguruan tinggi swasta dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran yang dapat disesuaikan oleh setiap universitas.

Pada masa transisi, perguruan tinggi diimbau untuk tidak terburu-buru mengubah peraturan akademik yang berlaku, seperti kurikulum. Sebaliknya, mereka harus melakukan evaluasi diri secara komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Dirjen Pendidikan Vokasi, ini adalah waktu bagi perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan. Mereka harus mempersiapkan diri dengan baik, mengubah kurikulum, dan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi mereka.

(Rini Suryati)-f

OTOMOTIF

Mitsubishi Kuda 'Meringkik' Kembali

SETELAH lama vakum, Mitsubishi Kuda Reborn 2023 kembali hadir dengan membawa kapasitas mesin lebih besar. Ditenagai oleh mesin bensin 2.4 liter MIVEC, empat silinder segaris yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 163 HP dan torsi maksimum sebesar 223 Nm.

Mesin pada Mitsubishi Kuda Reborn 2023 ini dijalankan dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 6 percepatan yang sudah dilengkapi dengan Eco Mode sehingga pemakaian bahan bakar lebih irit.

Mitsubishi Kuda Reborn 2023 telah membuat sensasi dengan perubahan luar biasa dalam desain dan performanya. Tetapi tak kalah mengagumkan adalah rangkaian fitur dan teknologi terbaru yang dihadirkan oleh mobil ini. Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan China Motor Corporation (CMC), mitra strategis MMC di Taiwan telah bekerja sama dengan baik untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih modern, aman, dan nyaman.

Salah satu fitur yang paling mencolok dalam Mitsubishi Kuda Reborn 2023 adalah layar sentuh tujuh inci di dashboard. Layar ini memberikan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, yang memungkinkan pengemudi untuk mengakses berbagai fungsi kendaraan dengan mudah. Selain itu, juga dapat terhubung dengan smartphone, memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk mengakses aplikasi, navigasi, dan hiburan langsung dari layar sentuh mobil.

Untuk fitur keselamatannya, Mitsubishi Kuda Reborn 2023



sudah dilengkapi dengan dual airbag, sistem pengereman ABS dan EBD, Hill Start Assist, Stability Control, Traction Control dan Parkir sensor yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi setiap pengemudi dan penumpang. Fitur tambahan penting adalah immobilizer, yang melindungi kendaraan dari upaya pencurian, serta sistem alarm yang dapat memberi peringatan jika ada usaha peretasan atau pencurian.

Sistem pengereman anti-lock (ABS) membantu mengurangi risiko tergelincir saat pengereman mendadak. Selain itu, terdapat pula Electronic Brakeforce Distribution (EBD) yang memastikan distribusi daya pengereman yang optimal. Sistem pengereman ini juga didukung oleh Brake Assist (BA) yang memberikan bantuan tambahan saat pengemudi melakukan pengereman mendadak.

Masuk kedalam bagian kabinnya, Mitsubishi Kuda Reborn 2023 telah menghadirkan beberapa fitur yang mampu memberikan kenyamanan ekstra. Seperti fitur keyless entry, AC dual zone, cruise control dan power outlet pada setiap baris kur-

si. Dalam konfigurasi kursi 2-3-2, mobil ini dapat menampung hingga tujuh penumpang, membuatnya ideal untuk perjalanan keluarga atau rombongan. Dashboardnya didesain dengan ergonomis, memungkinkan pengemudi untuk mengakses kontrol dengan mudah. Pengendali audio di kemudi, sehingga pengemudi bisa mengatur sistem audio tanpa mengalihkan perhatian dari jalan.

Keberadaan kamera belakang memungkinkan pengemudi untuk melihat area di belakang kendaraan saat mundur, yang dapat membantu menghindari tabrakan atau kerusakan yang tidak diinginkan. Hadir dalam tiga varian yakni GLX, GLS dan GT yang menghadirkan fitur berbeda sesuai kebutuhan pengendara.

Dari segi tampilan pun, Mitsubishi Kuda Reborn 2023 telah menghadirkan inovasi terbaru yang berbeda dari sebelumnya. Menggunakan bahasa desain dynamic shield di bagian depan dan bagian atap yang dibuat mengambang alias floating dari sisi pilar A dan C yang all blackout. (Ben)-f

DIGITAL

HP Android OS 4.1 Tak Bisa Lagi Pakai WhatsApp

PARA pengguna aplikasi WhatsApp di smartphone lawas harus mulai mengecek sistem operasi (operating system/OS) di perangkatnya masing-masing. Terhitung 24 Oktober 2023, WhatsApp bakal membatasi aplikasinya untuk dapat berjalan hanya di OS versi tertentu di smartphone Android.

"Perangkat dan perangkat lunak sering berubah, jadi kami secara berkala meninjau sistem operasi mana yang akan kami dukung dan melakukan pembaruan," tulis WhatsApp di laman FAQ-nya.

Menurut aplikasi chatting milik Meta itu, setiap tahunnya mereka meninjau perangkat dan perangkat lunak mana yang paling lama dan dengan jumlah pengguna sedikit, untuk menentukan dukungan apa yang akan disetop.

"Perangkat ini mungkin juga tidak memiliki pembaruan keamanan terbaru atau mungkin tidak memiliki fungsionalitas yang diperlukan untuk menjalankan WhatsApp," kata mereka.

Sejak 24 Oktober WhatsApp mengumumkan bahwa hanya HP Android dengan OS Android versi 5.0 dan yang lebih baru, yang akan mendapatkan dukungan dari mereka. Sebelumnya, OS Android minimal yang direkomendasikan untuk aplikasi WhatsApp adalah OS 4.1.

"Mulai 24 Oktober 2023, hanya OS Android versi 5.0

dan yang lebih baru yang akan didukung," tulis perusahaan.

Jadi, buat pengguna HP Android kira-kira masih memakai OS 4.1 atau yang lebih lama, ada baiknya untuk melihat versi berapa sistem operasi yang dipakai saat ini. Apabila sudah tidak didukung, pengguna HP Android dapat melakukan update OS apabila masih bisa melakukan pembaruan, atau harus mengganti perangkat ke yang lebih baru jika tidak bisa update.

Sementara untuk iPhone, hanya perangkat yang sudah menjalankan iOS 12 dan yang lebih baru, yang masih dapat dukungan. OS lain yang masih didukung aplikasi WhatsApp adalah KaiOS 2.5.0 dan yang lebih baru, termasuk JioPhone dan JioPhone 2.

Sementara, WhatsApp akan memperluas kehadirannya di perangkat iPad.

Informasi ini diketahui berdasarkan laporan terbaru WABetaInfo. Mengutip informasi dari Android Police, aplikasi WhatsApp untuk iPad dibangun Meta bersama Mac Catalyst. Aplikasi ini diketahui sudah bisa diakses oleh pengguna yang memiliki WhatsApp beta di perangkatnya.

Untuk menjajalnya, pengguna perlu lebih dulu memasang aplikasi TestFlight di perangkat yang ingin dipakai. Setelah itu, pengguna tinggal memindai kode QR di iPad menggunakan akun WhatsApp utama di perangkat mereka. Begitu terhubung dengan akun utama, seluruh riwayat percakapan pengguna nantinya akan muncul di iPad. Pengguna juga bisa menjalankan aplikasi ini secara mandiri, tanpa perlu perangkat utama terhubung dengan internet. (Ben)-f

